

BAB III

INTERVENSI PERANCIS KE PANTAI GADING

Pantai Gading merupakan produsen kakao terkemuka di dunia yang mengalami krisis politik yang parah. Puncak dari krisis terjadi pada tahun 2011 yang disebabkan oleh pemilihan presiden pada tahun 2010 antara mantan presiden Laurent Gbagbo dengan Alassane Ouattara yang keduanya mengklaim kemenangan pemilihan dan membentuk pemerintahan yang berlawanan. Laurent Gbagbo yang didukung oleh pasukan khusus yang setia terhadapnya sedangkan Alassane Ouattara didukung oleh pasukan yang setia terhadap Ouattara dan unsur-unsur Garda Republik.

A. Sejarah Konflik di Pantai Gading

Selama akhir tahun 1990-an, Pantai Gading menikmati ledakan ekonomi berkat liberalisasi dan reformasi pasar. Sejumlah besar imigran berbondong-bondong ke Pantai Gading untuk bekerja di industri tanaman termasuk kopi, kelapa sawit, karet dan terutama biji kakao.

Pantai Gading mengalami kudeta militer pertama kali pada tanggal 25 Desember 1999. Kudeta dipimpin oleh Tuo Fozie yang berhasil menggulingkan Henri Konan Bedie dari jabatan Presiden dan mengangkat Jendral Robert Guéi menjadi Presiden. Bedie dituduh melakukan korupsi, represi politik, dan pengucilan imigran yang berasal dari negara-negara tetangga.

Guéi membentuk sebuah pemerintahan baru dan berjanji akan mengadakan pemilihan terbuka pada akhir tahun 2000. Namun Jendral Guéi mengecualikan perwakilan dari *Rassemblement des réublicains*, ia mengadakan referendum mengenai amandemen konstitusi yang mewajibkan kandidat pemilihan memiliki darah asli Pantai Gading dan tidak ada

keturunan dari luar negeri.⁴⁵ Alassane Ouattara di diskualifikasi dari pemilihan karena pengadilan mengatakan ibunya berasal dari Burkina Faso. Akhirnya pemilihan dilanjutkan antara kandidat Jendral Guéi dengan Front Populaire Ivoirien (FPI) yakni Laurent Gbagbo. Hasil pemilihan menyatakan bahwa Laurent Gbagbo sebagai pemenang namun Jendral Guéi mengklaim bahwa terjadi kecurangan saat pemungutan suara. Ia pun membubarkan komisi pemilihan dan menyatakan dirinya sebagai pemenang.⁴⁶

Paska pemilihan terjadi pertarungan antara pendukung Laurent Gbagbo dengan para penjaga istana kepresidenan. Banyak tentara yang bergabung dalam perang melawan pemerintah yang diakui oleh Jendral Guéi, akhirnya Guéi melarikan diri dari istana. Laurent Gbagbo yang dianggap sebagai pemenang dinyatakan sebagai Presiden. Akan tetapi, para pendukung partai RDR yakni Alassane Ouattara meminta untuk diadakan pemilihan baru. Bentrokan pun terjadi antara Pasukan pemerintah yang bergabung dengan FPI menyerang pasukan RDR. Akibat dari konflik ini ratusan orang terbunuh. Untuk mendamaikan konflik ini pada akhirnya Alassane Ouattara mengakui Laurent Gbagbo sebagai Presiden.

Pada tahun 2002 konflik kembali terjadi, Guillaume Soro seorang pemimpin pelajar yang berusia 28 tahun yang bergabung bersama pendukung Alassane Ouattara mencoba untuk menggulingkan Laurent Gbagbo. Sebanyak 800 tentara yang tidak puas dengan pemerintah mengangkat senjata untuk bergabung dengan pemberontakan. Pertempuran terjadi di

⁴⁵ Joseph Savès, "24 décembre 1999 Coup d'État en Côte d'Ivoire", diakses dari https://www.herodote.net/24_decembre_1999-evenement-19991224.php, pada tanggal 27 November 2017 pukul 00.30

⁴⁶ John Pike, "Ivory Coast Conflict", diakses dari <https://www.globalsecurity.org/military/world/war/ivory-coast.htm>, pada tanggal 27 November 2017 pukul 00.41

pusat ibu kota, diperkirakan menewaskan 300 orang dalam pertempuran ini. Pada malam pertama pertempuran mantan Presiden Robert Guéï terbunuh yang dibunuh oleh pasukan pemerintah karena mereka mengira bahwa Robert Guéïlah yang bertanggung jawab atas pemberontakan tentara tersebut, ia terbunuh dirumahnya bersama istri, anak laki-laki serta cucunya.⁴⁷ Akhirnya tentara Perancis datang untuk melakukan campur tangan agar pertemuran tidak meluas. Intervensi Perancis ini berdasarkan perjanjian keamanan sejak kemerdekaan Pantai Gading.

Laurent Gbagbo tidak menyukai sikap Perancis yang melakukan campur tangan terhadap konflik ini, Gbagbo mencurigai bahwa Perancis merencanakan penggulingan terhadap dirinya. Dan ia tidak ingin melaksanakan kesepakatan pertahanan antara kedua negara. Gbagbo akhirnya mengambil tindakan yakni dengan memerintahkan para aktivisnya untuk melawan Perancis. Dua pesawat milik Pantai Gading diterbangkan dari bandara Yamoussoukro mengebom markas tentara Perancis yang berada di Bouaké yang menewaskan sembilan tentara Perancis. Karena konflik semakin memuncak akhirnya Dominique de Villepin, Menteri Luar Negeri Perancis diasingkan yang diancam akan dibunuh. Pendukung Gbagbo memburu orang Perancis yang umumnya orang berkulit putih. Mereka melakukan penjarahan, pembunuhan dan pemerkosaan.

Dampak dari pemberontakan ini menyebabkan negara ini terbelah menjadi dua wilayah, bagian utara dikuasai oleh pemberontak muslim dan bagian selatan dikuasai oleh pemerintahan yang berbasis kristen. Sekitar 600 pasukan

⁴⁷ John Pike, "Ivory Coast Conflict 2002", diakses dari <https://www.globalsecurity.org/military/world/war/ivory-coast-2002.htm>, pada tanggal 24 Oktober 2017 pukul 22.22

Licorne dikerahkan yang berkomitmen untuk menjamin keamanan warga negara Perancis sejak kudeta tahun 2002 ini. Pasukan Licorne bertanggung jawab untuk mengendalikan gencatan senjata.

Pada tanggal 22 September 2002, pemberontak bersedia untuk melakukan negosiasi dengan pemerintah akan tetapi dengan ketentuan bahwa pihak ketiga harus melakukan intervensi. Namun keesokan harinya baku tembak kembali terjadi di daerah Bouake, Pemerintah Pantai Gading melakukan tuduhan bahwa usaha kudeta ini di dukung oleh negara tetangga. Tuduhan ini memicu xenophobia bagi warga negara Pantai Gading, hal inilah yang membuat semakin bencinya mereka terhadap penduduk di wilayah utara yang mayoritas pekerja imigran serta mereka juga menyerang pasukan Perancis yang berada di Pantai Gading.⁴⁸

Pada tanggal 28 September 2002, para pemimpin di wilayah Afrika Barat mulai meningkatkan perannya untuk mengakhiri pemberontakan. Perdana menteri Pantai Gading, Pascal Affi N'Guessan mengatakan bahwa pemerintah Pantai Gading menginginkan bantuan logistik untuk membantuk pemerintah dalam pertempuran melawan tentara pemberontak. Pada tanggal 29 September, kepala ECOWAS (Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat) yakni Presiden Senegal Abdoulaye Wade mengadakan rapat untuk membahas masalah pengiriman pasukan penjaga perdamaian ke Pantai Gading.⁴⁹

Perang terus berlanjut hingga akhir tahun 2002, warga negara Pantai Gading melaporkan kepada Perancis bahwa terdapat tumpukan mayat setinggi 2 meter di atas gundukan setinggi 30 meter. Diperkirakan terdapat 100 mayat yang berlokasi di 70 kilometer sebelah barat Daloa, dekat dengan kota Pelezi. Kota ini menjadi tempat pertempuran antara kedua kubu. Dengan ditemukan kuburan masal ini, membuat

⁴⁸ Ibid

⁴⁹ Ibid

kelompok hak asasi manusia yakni Amnesty yang berbasis di London mengirim sebuah tim untuk menyelidiki masalah tersebut dan untuk memeriksa situasi hak asasi manusia di wilayah yang dikuasai pemerintah. Namun pemerintah Pantai Gading membantah jika mereka terlibat dalam insiden tersebut.

Dikarenakan situasi tidak kunjung mereda, pada 16 Desember 2002 Perancis menambah sekitar 500 pasukan ke Pantai Gading untuk bergabung dengan 1500 pasukan yang sudah berada di wilayah tersebut dan ECOWAS juga mengirimkan 1500 pasukan ke Pantai Gading. Mereka bertugas untuk menjaga stabilitas negara Pantai Gading yang sedang berkonflik. Perancis juga menyatakan mereka tidak akan berpihak dalam konflik kehadiran mereka hanyalah untuk menjaga warganya dan berusaha menjaga stabilitas genjatan senjata.

Pada tahun 2003, PBB mengirimkan MINUCI (The United Nations Mission in Cote d'Ivoire) ke Pantai Gading. Pasukan tak bersenjata ini bertugas untuk memberikan bantuan untuk pasukan Perancis dan ECOWAS yang telah beroperasi di wilayah tersebut. MINUCI juga bertugas untuk memantau krisis kemanusiaan, sekitar 700.000 orang Pantai Gading telah kehilangan tempat tinggal dan mengalami penganiayaan etnis akibat dari pertempuran di negara tersebut.⁵⁰

Sudah banyak upaya pemerintah dan organisasi internasional untuk mendamaikan kedua belah pihak. Sempat ada kesepakatan damai antara pemerintah dan pemberontak, pihak pemberontak meminta kepada pemerintah untuk pembagian kekuasaan yang akan diberikan kepada pemimpin pemberontak dan partai oposisi. Gbagbo akan tetap menjadi presiden dan pemberontak bersedia untuk melucuti senjata

⁵⁰ John Pike, "Ivory Coast Conflict 2003", diakses dari <https://www.globalsecurity.org/military/world/war/ivory-coast-2003.htm>, pada tanggal 27 November 2017 pukul 23.18

agar konflik berakhir. Namun setelah kesepakatan ditanda tangani, konflik kembali terjadi di kota Abidjan. Para demonstran yang setia kepada pemerintah memprotes perjanjian tersebut karena isi perjanjian terlalu memihak keinginan pemberontak.⁵¹ Konflik di Pantai Gading terus berlanjut dan mencapai klimaksnya pada tahun 2011.

B. Pemilihan Presiden Sebagai Pemicu Perang Saudara Tahun 2010

Penduduk Pantai Gading, terakhir kali mengadakan pemilihan umum pada tahun 2000 dan membuat Laurent Gbagbo menjadi Presiden. Semasa pemerintahan Gbagbo Pantai Gading mengalami krisis sosial dan politik. Banyak korban berjatuhan yang disebabkan bentrokan antara Pemerintah dengan Para Pemberontak. Hubungan antara pemerintah Pantai Gading dengan Perancis pun menjadi rusak setelah pasukan Gbagbo menembak sembilan tentara Perancis yang bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian. Menanggapi hal tersebut, Perancis pun melenyapkan Angkatan Udara Pantai Gading.⁵²

Konflik yang pecah pada tahun 2002 berakhir dengan melakukan perjanjian damai pada tahun 2007. Perjanjian ini bernama Marcoussis, pemberontak dan Pemerintah menandatangani kesepakatan damai pembagian kekuasaan yang dimediasi oleh Burkina Faso. Kesepakatan ini ditetapkan antara lain karena kondisi pemilihan presiden yang tertuda sejak tahun 2005. Pemerintah Pantai Gading kesulitan untuk mengidentifikasi dan mensensus penduduk. Diperkirakan pemerintah menghabiskan dana sekitar 200Milliar CFA Franc

⁵¹ Ibid

⁵² Robert Marquand, "Gbagbo plays an 'ugly colonialist' card as the French intervene in Ivory Coast", diakses dari <https://www.csmonitor.com/World/Europe/2011/0404/Gbagbo-plays-ugly-colonialist-card-as-France-intervenes-in-Ivory-Coast>, pada tanggal 28 November 2017 pukul 00.32

(sekitar 305 Juta Euro) untuk melakukan pemilihan Presiden. Pada akhirnya kesepakatanpun terbentuk, pemilihan Presiden akan diadakan pada 31 Oktober 2010.

Pemilihan Presiden di Pantai Gading harus melalui dua putaran pemilihan, putaran pertama diikuti oleh 14 kandidat dan akan dipilih dua orang pemenang. Kemudian pada putaran kedua kedua pemengan tersebut akan berlomba untuk memenangkan suara terbanyak. Pada putaran pertama Laurent Gbagbo mendapatkan 38% suara dan Alassane Ouattara memiliki 32% suara. Diperingkat ketiga diduduki oleh mantan Presiden Pantai Gading yakni Henri Konan Bedie yang mendapatkan hanya 25% suara. Tingkat partisipasi masyarakat sebanyak 80%.

Selanjutnya, pada putaran kedua yang bertarung adalah Laurent Gbagbo melawan Alassane Ouattara. Pemilihan diadakan pada tanggal 28 November 2010. Dari pemilihan yang telah berlangsung berdasarkan hasil dari Komisi Pemilihan Independen Cote d'Ivoire (IEC) memenangkan Alassane Ouattara dengan suara 54,1% dan Laurent Gbagbo memiliki suara sebanyak 45,9% suara. Masyarakat internasional mendukung hasil pemungutan suara IEC yang akurat dan berwibawa.⁵³ Laurent Gbagbo tidak terima keputusan dari IEC, Ia mengajukan banding ke Dewan Konstitusional, kemudian pada tanggal 3 Desember 2010 diumumkan bahwa Laurent Gbagbo lah yang menang dengan perolehan 51,5% suara. Akibatnya kedua pihak sama-sama mengakui kemenangan.

Berdasarkan laporan PBB, perselisihan politik terhadap perebutan kekuasaan ini telah membunuh lebih dari 170 orang. Ada kekhawatiran perang saudara akan menyala kembali. Dalam siaran persnya juru bicara Gbagbo

⁵³ Nicolas Cook, "Côte d'Ivoire Post-Gbagbo: Crisis Recovery", diakses dari <https://fas.org/sgp/crs/row/RS21989.pdf>, pada tanggal 28 November 2017 pukul 01.30

menyatakan bahwa PBB yang bekerja sama dengan militer Perancis telah mengganggu urusan internal Pantai Gading, dan mereka harus meninggalkan negara tersebut. Juru bicara PBB yakni Michel Bonnardeaux menanggapi hal tersebut, ia menyatakan bahwa untuk meninggalkan negara yang telah terpecah itu tidak relevan dalam pemeliharaan perdamaian. Pernyataan Gbagbo tidak berpengaruh karena ia bukan Presiden Pantai Gading, UN, Uni Eropa, ECOWAS, Perancis, Amerika Serikat dan banyak negara lainnya yang mengakui Alassane Ouattara sebagai pemenang dalam pemilihan Presiden.⁵⁴

Laurent Gbagbo menolak mundur dari jabatan, bentrok terjadi antar pendukung kedua belah pihak. Pada tanggal 19 Januari, UNOCI menambah 2000 pasukan penjaga keamanannya. Bentrokan menyebar hingga ke bagian barat negara tersebut yang membuat situasi semakin parah, telah terjadi banyak korban jiwa dari kerusuhan ini. Akhirnya Dewan Keamanan mengeluarkan resolusi 1975 (2011) pada 30 Maret 2011 yang menegaskan seruan agar Laurent Gbagbo mundur dan segera mengakhiri kekerasan terhadap warga sipil. Mandat ini semakin mempertegas bahwa UNOCI bertugas untuk melindungi warga sipil, termasuk mencegah penggunaan senjata berat terhadap mereka.⁵⁵

Paska Ban Ki-Moon mengulangi seruannya, ia mengatakan bahwa “saya sangat prihatin dengan situasi kemanusiaan di seluruh negeri dan tentang pelanggaran hak asasi manusia, warga sipil menanggung beban kekerasan dan pertempuran harus dihentikan” Pasukan Gbagbo juga menyerang patroli UNOCI dengan menggunakan RPG dan

⁵⁴ John Pike, “Ivory Coast Conflict 2010”, diakses dari <https://www.globalsecurity.org/military/world/war/ivory-coast-2010.htm>, pada tanggal 28 November 2017 pukul 09.41

⁵⁵ “Post crisis election”, diakses dari <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unoci/elections.shtml>, pada tanggal 28 November 2017 pukul 10.02

senapan mesin untuk menyerang warga sipil di lingkungan Adjamé dan Attecoube. Sempat terjadi serangan yang ditargetkan ke Golf Hotel yang menjadi markas pemerintahan Alassane Ouattara, satu pasukan UNOCI mengalami luka akibat serangan tersebut. Menanggapi hal tersebut Ban Ki-Moon pun mengatakan “tindakan ini tidak dapat diterima dan tidak dapat dilanjutkan,” Ban juga, mengatakan “tindakan pasukan pro-Gbagbo telah memaksa dia meminta UNOCI untuk mengambil tindakan untuk melindungi diri mereka sendiri dan penduduk sipil Abidjan”.⁵⁶

Diperkirakan sekitar 1,5 juta orang warga sipil mencoba melarikan diri, namun mereka dicegah oleh kelompok bersenjata. Komisari Tinggi UNHCR yakni António Guterres menyerukan untuk tidak ada target serangan terhadap warga sipil semua upaya harus dilakukan agar warga sipil tidak di tempatkan dalam bahaya. Yang menjadi perhatian khusus António Guterres yakni kepada orang-orang yang kesulitan dalam bergerak seperti orang tua, orang sakit, dan wanita hamil.⁵⁷ UNHCR melaporkan sebanyak 29.725 orang telah melarikan diri ke Liberia yang bergabung dengan 40.000 orang Pantai Gading yang sudah berada disana. Di kamp pengungsian terdapat layanan kesehatan, pendidikan dan air bersih.

⁵⁶ “UN troops began operations in the Ivorian city in response to pro-Gbagbo forces”, diakses dari <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=38068&Cr=Ivoire&Cr1=#.WduKj2997Dc>, pada tanggal 28 November 2017 pukul 10.10

⁵⁷ “UNHCR urges humanitarian access to people trapped in combat in Abidjan Cote d'Ivoire”, diakses dari <http://www.unhcr.org/4d6ce0289.html>, pada tanggal 28 November 2017 pukul 10.29

C. Bentuk-Bentuk Intervensi Perancis ke Pantai Gading

Pada tanggal 4 April 2011, UNOCI melakukan operasi militer untuk mencegah penggunaan senjata berat terhadap penduduk sipil dan menghentikan serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian. Dibawah Resolusi Dewan Keamanan PBB 1975 pada tanggal 30 Maret 2011, untuk menetralkan senjata berat pasukan Laurent Gbagbo yang mengancam populasi. Secara khusus dalam dua kesempatan, yakni pada tanggal 4 dan 10 April. Helikopter Licorne ikut campur dalam mendukung helikopter UNOCI untuk menetralkan kendaraan lapis baja dan senjata berat seperti meriam, mortir dan peluncur roket.⁵⁸

Perancis mengerahkan 900 tentara, Pasukan Perancis di Pantai Gading (FFCI) memiliki lima hak utama, terutama berpusat di Abidjan yaitu:

1. kamp Port-Bouët;
2. hak jalan La Bourgerie di bandara Abidjan;
3. detasemen intervensi laguna (DIL) di Port-Bouët;
4. kamp yang dibangun LCL Saboret;
5. kompleks pemotretan Lomo Nord.⁵⁹

Pasukan FFCI memiliki beberapa misi yakni:

⁵⁸ "French troops in Ivory Coast" diakses dari <http://www.defense.gouv.fr/operations/operations/autres-operations/operations-achevees/operation-licorne-2002-2015/dossier-de-presentation-de-l-operation-licorne/les-forces-francaises-en-cote-d-ivoire>, pada tanggal 29 November 2017 pukul 00.22

⁵⁹ "French troops in Ivory Coast", diakses dari <http://www.defense.gouv.fr/ema/forces-prepositionnees/cote-d-ivoire/dossier/les-forces-francaises-en-cote-d-ivoire>, pada tanggal 29 November 2017 pukul 00.43

1. Mendukung operasi dengan memfasilitasi pergerakan (transportasi, bantuan manusia dan material) juga berkontribusi untuk kebutuhan minyak.
2. Membentuk reservoir kekuatan yang dapat diproyeksikan dengan cepat jika terjadi krisis subregional
3. Memastikan perlindungan warga negara
4. Memberi dukungan kepada UNOCI sesuai dengan ketentuan Resolusi Dewan Keamanan
5. Melaksanakan kerjasama militer bilateral dengan Republik Cote d'Ivoire dan memfasilitasi kerjasama regional dengan kekuatan mitra subregional.⁶⁰

Terdapat beberapa alasan lain yang membuat Perancis mengintervensi Pantai Gading yakni, untuk menyelamatkan 12.000 warga negara Perancis yang menetap di Pantai Gading dan untuk mempertahankan kepentingan ekonomi Perancis. Perancis merupakan pemegang saham utama Perusahaan Listrik Pantai Gading (CIE) dan Korporasi Pantai Gading (SODECI). Perusahaan Perancis yakni France Telecom memiliki 51% dari Côte d'Ivoire Telecom dan telah menjadi operator telekomunikasi utama dengan menciptakan Société Ivoirienne de Mobiles (SIM).⁶¹

Paska penerjunan pasukan Perancis di Pantai Gading pada 10 April, dalam kurun waktu 24 jam helikopter Perancis membombardir pasukan pro-Gbagbo. Selanjutnya pasukan Alassane Ouattara menyerang kediaman Presiden yang diketahui bahwa Gbagbo bersembunyi dibunkernya. Keesokan harinya, UNOCI mengkonfirmasi bahwa mantan Presiden Laurent Gbagbo telah ditangkap oleh pasukan Alassane Ouattara dan berada dalam tahanan mereka. UNOCI sesuai

⁶⁰ Ibid

⁶¹ Victor Guilbert, "Pourquoi la France est-elle intervenue en Côte d'Ivoire ?", diakses dari <http://www.afrik.com/article22528.html>, pada tanggal 29 November 2017 pukul 03.04

mandatnya akan memberikan keamanan dan perlindungan bagi Gbagbo saat dia dalam tahanan.⁶²

Akibat dari konflik ini, diperkirakan menelan korban kurang lebih 3000 jiwa⁶³, terdapat juga 42 kasus pemerkosaan beberapa diantaranya hamil dan anak dibawah umur. Untuk membantu warga sipil yang terkena dampak PBB dan mitranya memberikan bantuan sebesar \$160Juta untuk Pantai Gading. PBB juga meminta pemerintah Ouattara agar warga Pantai Gading tidak melakukan provokasi ataupun balas dendam terhadap pasukan pro-Gbagbo.

Pada tanggal 21 Mei 2011, Alassane Ouattara secara resmi dilantik sebagai Presiden Pantai Gading. 20 Kepala Negara dan pejabat tinggi lainnya termasuk Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon menghadiri upacara peresmian di Yamoussoukro, ibukota Pantai Gading. Dalam pidatonya Alassane Ouattara berkomitmen untuk melakukan rekonsiliasi, dialog dan perdamaian menyusul kekerasan paska pemilihan. Alassane Ouattara juga mengucapkan terimakasih kepada masyarakat dunia karena telah melakukan solidaritas dan membantu kemenangan demokrasi di Pantai Gading. Ia juga memberikan penghormatan khusus kepada PBB karena telah membantu memulihkan demokrasi dan berkontribusi pada pembentukan perdamaian abadi.

Pada bulan November, Laurent Gbagbo dibawa ke Den Haag dengan tuduhan sebagai berikut: Pembunuhan, Pemerkosaan, Tindakan tidak manusiawi, dan Penganiayaan. Kejahatan ini diduga dilakukan antara 16 dan 19 Desember 2010 selama dan setelah demonstrasi pro-Ouattara di markas

⁶² "Post crisis election", diakses dari <http://www.un.org/en/peacekeeping/missions/unoci/elections.shtml>, pada tanggal 29 November 2017 pukul 01.37

⁶³ "Profile of Ivory Coast – Timeline", diakses dari <http://www.bbc.com/news/world-africa-13287585>, pada tanggal 29 November 2017 pukul 01.58

besar RTI, pada tanggal 3 Maret 2011 pada demonstrasi perempuan di Abobo, pada tanggal 17 Maret 2011 dengan menembaki daerah padat penduduk di Abobo, dan pada atau sekitar 12 April 2011 di Yopougon.⁶⁴ Kekerasan meletus di Pantai Gading ketika Laurent Gbagbo menolak untuk menyerahkan kekuasaan setelah kalah dalam pemilihan presiden melawan Alassane Ouattara mengakibatkan 3000 orang tewas dan akhirnya Laurent Gbagbo divonis 20 tahun penjara.

⁶⁴ Diakses dari <https://www.icc-cpi.int/cdi/gbagbo-goude/pages/alleged-crimes.aspx>, pada tanggal 29 November 2017 pukul 02.40